

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



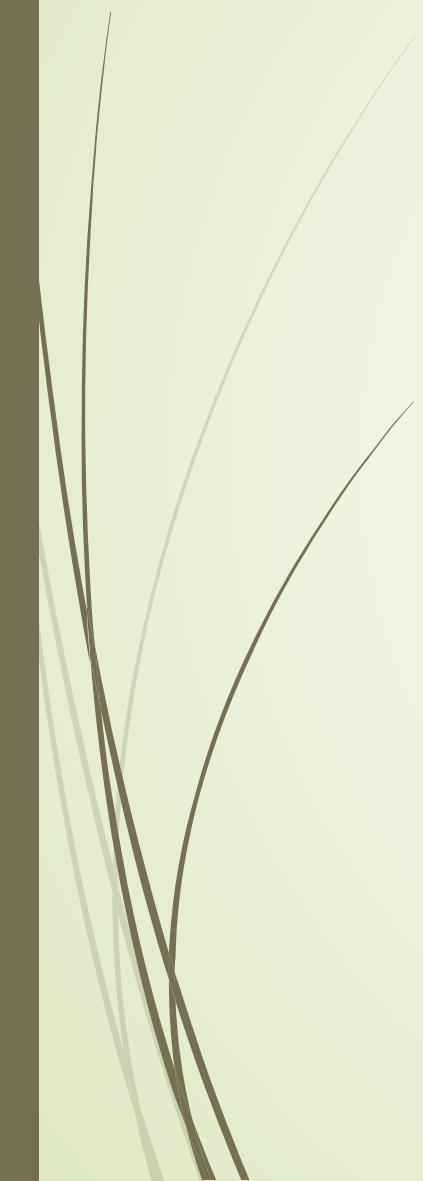


Pengertian Kebijakan Ekonomi Internasional

- ▶ Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro.
- ▶ Kebijakan Ekonomi Internasional dalam arti luas adalah tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah (suatu negara), yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional.



Instrumen Kebijakan Internasional

- Kebijakan Perdagangan Internasional
 - Kebijakan Pembayaran Internasional
 - Kebijakan Bantuan Luar Negeri
- 



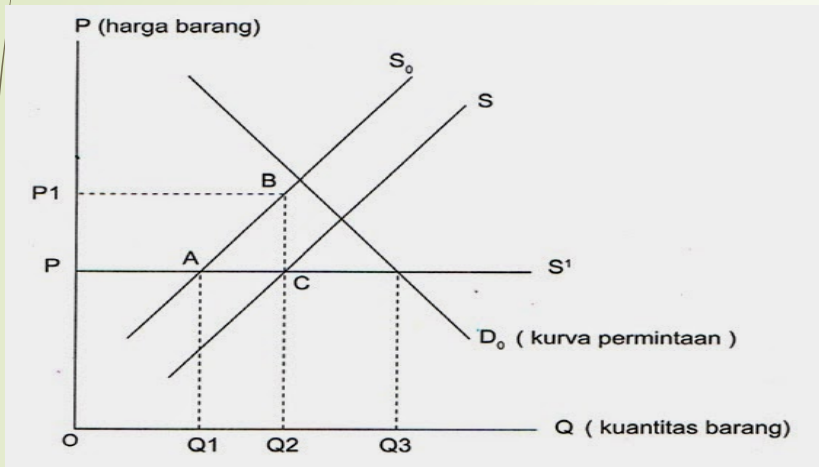
Tujuan Kebijakan Internasional

- Autarki (system eko. Swasembada dan perdagangan terbatas)
- Kesejahteraan (Welfare)
- Proteksi /Protection
- Keseimbangan Neraca Pembayaran
(Equilibrium Balance Of Payment=BOP)
- Pembangunan Ekonomi (Economic Development)

Macam-macam Restriksi/ pembatasan dalam Perdagangan Internasional

1. Kebijakan Ekspor dalam perdagangan Internasional
 - a. Diskriminasi harga
 - b. Subsidi
 - c. Premi
 - d. Dumping
 - e. Kuota Ekspor
 - f. Larangan Ekspor
 - g. Politik dagang bebas

Pengaruh subsidi biaya produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor



Keterangan :

- QQ_2 Besarnya produksi dalam negeri sebelum ada subsidi
- Q_1Q_3 Besarnya impor barang sebelum ada subsidi untuk produksi dalam negeri
- OQ_3 Besarnya konsumsi barang di dalam negeri
- OP Tingkat harga sebelum ada subsidi
- BC Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah sehingga kurva penawaran bergeser dari S_0 ke S_1
- OQ_2 Besarnya produksi dalam negeri setelah adanya subsidi
- Q_2Q_3 Besarnya impor barang setelah ada subsidi untuk produksi dalam negeri
- PP_1BC Besarnya subsidi total yang diberikan kepada produsen dalam negeri
-

Setelah ada subsidi, harga barang tetap sebesar OP dan jumlah konsumsi barang juga tetap sebesar OQ_2 .

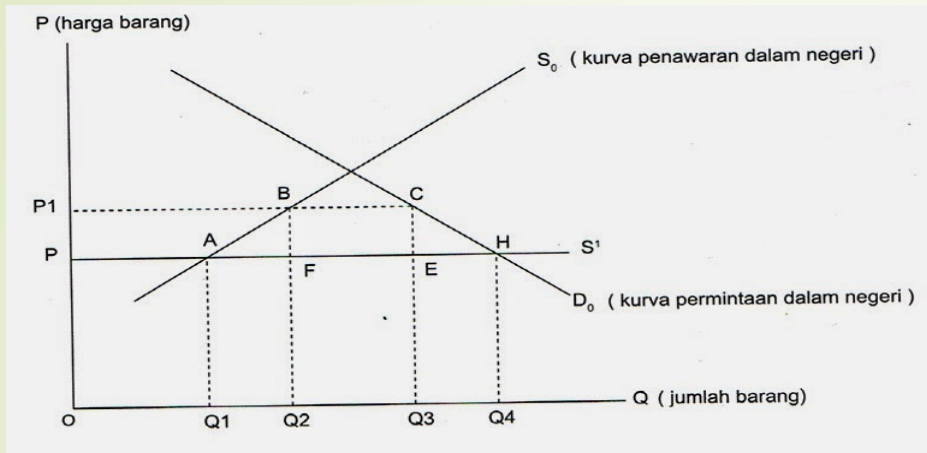


Macam-macam Restriksi dalam Perdagangan Internasional

2. Kebijakan Impor dalam perdagangan Internasional

- a. Pengenaan bea masuk/tarif
- b. Kuota impor
- c. Larangan Impor
- d. Pengendalian devisa
- e. Kebijakan substitusi impor
- f. Devaluasi

Adanya kuota impor berarti barang-barang impor di pasaran tersedia terbatas. Hal tersebut berarti barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri dapat bersaing. Jika digambarkan dalam bentuk kurva akan tampak seperti berikut :

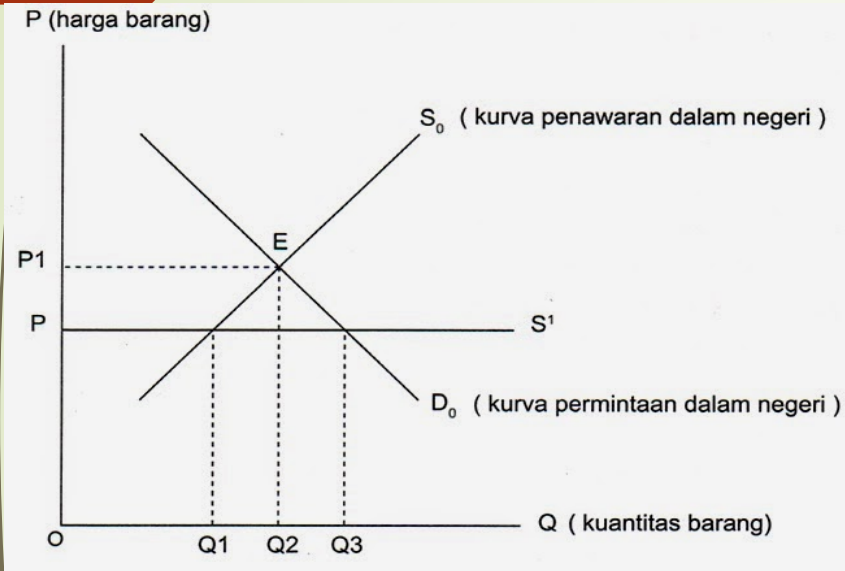


Keterangan :

- Q_1Q_4 besarnya produksi dalam negeri sebelum ada kuota impor
- Q_1Q_4 besarnya konsumsi dalam negeri sebelum ada kuota impor
- Q_1Q_2 besarnya impor barang dan luar negeri sebelum ada kuota impor
- OP harga barang sebelum ada kuota impor
- Q_2Q_3 besarnya impor barang yang diperkenankan pemerintah setelah kuota
- OP_1 harga barang dalam negeri setelah adanya kuota impor
- Q_1Q_2 besarnya produksi dalam negeri setelah adanya kuota impor
- Q_2Q_3 besarnya konsumsi setelah adanya kuota impor

Segiempat BCEF keuntungan yang diperoleh pedagang pengimpor setelah adanya kuota.

Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, pengaruh larangan impor terhadap harga barang akan tampak seperti berikut :



- OQ besarnya produksi dalam negeri sebelum ada larangan impor
- Q_1Q_3 besarnya impor barang sebelum ada larangan
- OQ_3 besarnya konsumsi barang sebelum ada larangan impor
- OP tingkat harga barang sebelum ada larangan impor
- OQ_2 besarnya produksi dalam negeri setelah ada larangan impor
- OQ_2 besarnya barang setelah ada larangan impor karena tidak ada barang impor di pasar (impor = 0)
- OP_1 tingkat harga barang setelah ada larangan impor

Dengan adanya larangan impor, produsen dalam negeri dapat menjual barang lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi.

Macam-macam Restriksi dalam Perdagangan Internasional

3. Kebijakan Tarif dan Non-Tarif

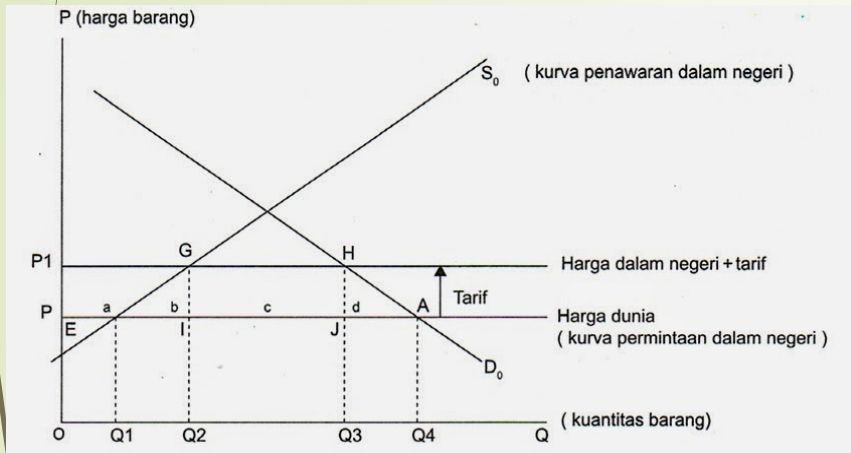
a. Kebijakan hambatan tarif

Kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) Adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik/mengenaikan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri.

b. Kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*)

Kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) Adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.

Pengaruh pembebanan terhadap harga barang impor dapat digambarkan dalam kurva berikut :



Keterangan :

- OP merupakan harga produsen di luar negeri sebelum ada pembebanan tarif
- OQ1 merupakan jumlah produksi dalam negeri
- OQ4 negeri besarnya konsumsi dalam negeri
- Q1Q4 besarnya impor barang-barang dan luar negeri
- PP1 merupakan besarnya tarif atas barang impor
- OP1 besarnya harga barang di dalam negeri setelah adanya tarif impor



Kebijakan Tarif

➤ Tarif adalah pembebanan pajak atau costum duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara

➤ Macam-macam penentuan tarif

1. Bea Impor
2. Bea Transito (bea/tax dikenakan pd brg2 melewati batas negara)
3. Bea Ekspor

➤ Perbedaan tarif menurut jenisnya

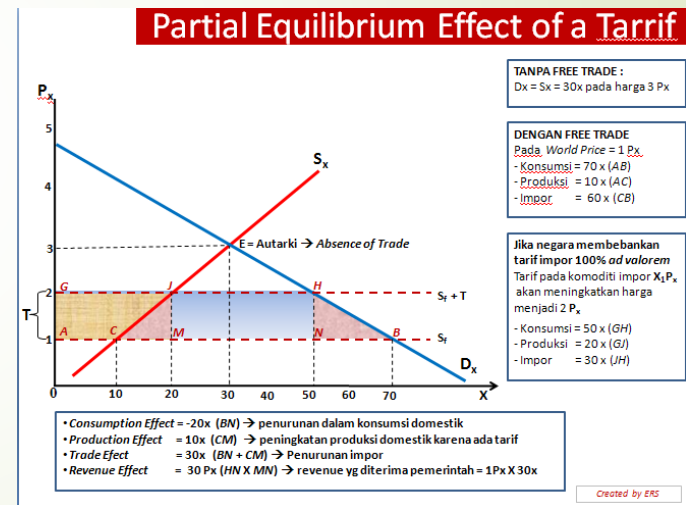
1. Ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut.
2. Specific duties, yakni bea yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang.
3. Specific Ad valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara specific dan ad valorem.

➤ Sistem tarif

1. Single-column tariffs, sistem dimana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif..
2. Double-column tariffs, sistem dimana setiap barang mempunyai 2 tarif
3. Triple-column tariffs, sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya sistem ini diperluas daripada double column tariffs, yaitu dengan menambah satu macam tariff preference untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini sering disebut dengan "Preferential System"

Efek tarif

- Efek terhadap harga (price effect)
- Efek terhadap konsumsi (consumption effect)
- Efek terhadap produk (protective/import substitution effect)
- Efek terhadap redistribusi pendapatan (redistribution effect)





Alasan pembebanan tarif

➤ Secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan

1. Memperbaiki dasar tukar
2. Infant – industry
3. Deversifikasi
4. Employment
5. Anti dumping

➤ Secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan

1. To keep money at home
2. The low-wage
3. Home market



Kebijakan Perdagangan lainnya



Politik Proteksi

Politik Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (*infant industry*) dan persaingan-persaingan barang-barang impor



Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antarnegara.

Kebijakan Perdagangan lainnya

► Politik Autarki

Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer

► Devisa

Devisa merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta.

Fungsi devisa

1. sebagai alat pembayaran luar negeri;
2. sebagai jaminan utang;
3. sebagai jaminan impor;
4. alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional.

► Devisa

Sumber-sumber devisa

1. penerimaan hasil minyak dan gas bumi;
2. pinjaman luar negeri;
3. jasa pengangkutan ke luar negeri;
4. penerimaan bunga obligasi asing;
5. pengiriman tenaga kerja Indonesia (TIC) keluar negeri;
6. penjualan kayu hutan ke luar negeri.

Cadangan devisa

- Cadangan devisa resmi atau official foreign exchange reserve,
- Cadangan devisa nasional atau country foreign exchange reserve

➤ Lalu lintas devisa

Beberapa kebijakan pengaturan sistem devisa yang pernah dilaksanakan di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- 1. Sistem Devisa Kontrol
- 2. Sistem Devisa Semikontrol
- 3. Sistem Devisa Bebas
- 4. Penegasan Sistem Devisa Bebas

